

Hendra Kurniawan  
hendra.yang7@gmail.com

Dosen Pendidikan Sejarah  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
Menekuni kajian  
sejarah Tiongkok



# Mei 1998 pada Gardu dan Portal

Tahun ini tepat dua dekade berlalu namun tragedi Mei 1998 masih menyisakan pertanyaan ingatan terhadap peristiwa itu terutama dirasakan oleh sebagian besar warga Tionghoa, khususnya di Jakarta dan Solo.

Mereka menjadi sasaran amuk massa yang terjadi siang hingga malam pada 12-16 Mei 1998. Tak terhitung jumlah toko dan rumah milik warga Tionghoa yang dirusak. Selain kerugian ekonomi akibat penjarahan dan perusakan, kekerasan fisik dan tekanan mental harus dirasakan warga Tionghoa kala itu.

Sejarah Kota Solo mencatat kisah panjang sentimen anti Tionghoa. Sejak metetes Geger Pecinan (1740-1743) yang memaksa keraton berpindah dari Kartasura ke Surakarta, etnis Tionghoa tak pernah absen menorehkan sejarah bagi perkembangan Kota Solo.

Pada era modern, sikap anti Tionghoa di Solo mengentuka ketika terjadi pertentangan antara Reksa Rumekso dengan Koung Sing (1911-1912) terkait masalah perdagangan batik. Kerusuhan anti Tionghoa juga terjadi pada masa awal kemerdekaan (1940-an), kemudian pada 1963 sebagai dampak dari PP No. 10/1959, dan pada 1980 yang bermula dari ketidaksengajaan gesekan antarindividu.

Terakhir tentu saja pada Mei 1998 yang paling banyak merugikan. Berbagai peristiwa ini seolah-olah menjadi rangkaian yang membentuk siklus konflik anti Tionghoa di Solo yang disebut bersumbu pendek. Peristiwa (gejala) sejarah memang dapat berulang, namun tidak dapat diorekan secara kaku.

Kota Solo menunjukkan situasi pluralitas yang kuat dalam konstelasi masyarakatnya. Interaksi antaretnis memang beberapa kali menimbulkan masalah, namun secara alamiah sejatinya mereka membaur dengan baik.

Benuran kepentingan ekonomi maupun nilai tradisi acap kali menyulut isu sentimen etnis. Kesadaran interkultural untuk

hidup berdampingan secara harmonis merupakan kunci penting.

## Economic Animal

Kebijakan pemerintah Orde Baru telah menyebabkan warga Tionghoa terus dianggap sebagai *outsider* yang apolitis dan asosial. Alhasil, perlakuan-lakuan warga Tionghoa lebih memilih menempatkan diri mereka sebagai *economic animal*. Situasi inilah yang pada gilirannya menyimpan bara konflik

gambaran umum yang terjadi pada masa Orde Baru.

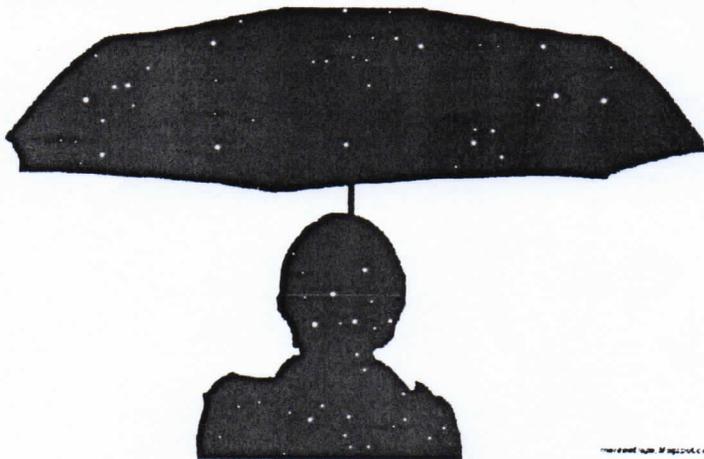
Setelah peristiwa Mei 1998, pola relasi antara etnis Tionghoa dengan warga lain mulai berubah. Abidin Kusno (2007) mencatat bahwa tanpa perlindungan berarti, warga etnis Tionghoa bersama warga lain berusaha mempertahankan kampung tempat tinggal mereka saat kerusuhan Mei 1998 terjadi di Solo.

Pos keamanan lingkungan atau gardu di kompleks perumahan diaktifkan dan ronda malam

pasiti. Politik asimilasi terkubur dan pintu untuk kembali pada jati diri Tionghoa terbuka lebar.

Jati diri tampak melalui budaya yang juga menjadi sarana penting mewujudkan keharmonisan tanpa sekat. Warga etnis Tionghoa di Solo saat ini memiliki ruang yang luas untuk mengaktualisasikan identitas budaya mereka.

Salah satunya ketika perayaan tahun baru Imlek. Warga etnis Tionghoa Solo bersama warga lainnya menggelar acara budaya Grebeg Sudiro. Pertunjukan bong-



dengan warga lainnya. Orientasi multikulturalisme sebagai konsep ideal yang jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu mengakomodasi warga Tionghoa saat itu sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Adanya kecenderungan sikap eksklusif dan menutup diri yang ditunjukkan warga Tionghoa menjadi penyebab ketidakterangan warga lain. Tentu tidak semua bersikap demikian, namun kaku pun ada sikap tersebut bukan tanpa sebab.

Dalam diri mereka tersimpan memori kuat (sindrom) pengalaman traumatis yang kerap terjadi. Warga Tionghoa sering kali mendapat penolakan dan tidak ada yang berani memberi jaminan keselamatan jika terjadi konflik. Situasi semacam ini menjadi

digalakkan. Portal-portal dibangun untuk mencegah masuknya masa yang tidak diinginkan. Warga etnis Tionghoa yang sebelumnya jarang terlibat, saat itu berburu dengan warga lain untuk menjaga keamanan bersama.

Kini keberadaan gardu dan portal lantas menjadi simbol penjaga memori tentang peristiwa yang penuh dengan kekacauan, gangguan, dan ketidakamanan itu. Gardu dan portal juga menjadi sarana yang mempersatukan warga walaupun hanya dalam ruang terbatas di kompleks atau kampung.

## Merayakan Perbedaan

Persatuan antarwarga ini tanpa disadari menjadi terjalin klan kuat karena ada ancaman konflik. Meskipun menyakitkan, tragedi Mei 1998 mendatangkan pula buah

barangsi, maupun wayang potehi juga mengundang antusiasme masyarakat umum yang mayoritas bukan Tionghoa.

Situasi dewasa ini kiranya menggugah diri kita untuk meyakini bahwa momentum merayakan perbedaan sungguh diperlukan. Terciptanya pembauran dan keharmonisan lebih bermakna dibanding upaya asimilasi ala Orde Baru.

Pada prinsipnya pembauran bukan berarti meniadakan perbedaan untuk dilebur menjadi satu, namun justru menerima perbedaan yang ada untuk memperkaya khazanah bangsa.

Sehat perbedaan akan luruh seiring dengan pengakuan terhadap keberadaan warga etnis Tionghoa beserta identitas ketionghoan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.